

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Manajemen Implementasi Kurikulum

Secara etimologi istilah manajemen berasal dari kata *managio* yang artinya pengurusan atau *managiare* yang artinya melatih dalam mengatur langkah-langkah.<sup>1</sup> Manajemen juga diartikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.<sup>2</sup> Selanjutnya Syafaruddin berpendapat, manajemen dalam perspektif luas adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Sadili Samsudin manajemen adalah upaya mengatur segala sesuatu ( sumber daya ) untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka manajemen dapat diartikan sebagai proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan, ketrampilan maupun nilai, dan sikap.<sup>5</sup> Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat ; Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, ( Jakarta : Nimas Multima, 2004 ), h.13.

<sup>2</sup> Syafaruddin dan Nurmiati, *Pengelolaan Pendidikan*, ( Medan : Perdana Publishing, 2011 ), h.17.

<sup>3</sup> Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Ciputat Press, 2005 ), h.42

<sup>4</sup> Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006 ), h.16.

<sup>5</sup> Kunandar, *Guru Professional, Implementas KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2009 ), h.233.

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup> sedangkan menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>7</sup> Sementara Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program<sup>8</sup>

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara etimologi kata kurikulum berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *curere*, yang berarti berlari. Penggunaan kata ini dihubungkan dengan *curer* atau kurir yang menjadi pengubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain dimana ia harus menempuh perjalanan ( jarak ) untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara terminologi, kata kurikulum bisa dimaknai sebagai : (1) *circle of instruction*, yaitu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat didalamnya, (2) seluruh program pembelajaran atau pengalaman pendidikan yang dipersiapkan oleh perancang pendidikan, sekolah, pendidik atau guru untuk mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan.<sup>9</sup>

Dalam kosa kata Arab, istilah yang selalu digunakan untuk menyebutkan kurikulum pendidikan adalah “*manhaj*” yang berarti jalan terang yang harus dilalui pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik

---

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, ( Bandung : CV. Sinar Baru,2002 ),h.70

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, ( Surakarta : Harapan Press,2004 ), h.39

<sup>8</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, ( Jakarta : Rineka Cipta,2002), h.67

<sup>9</sup> Al Rasyidin, *Filsafah Pendidikan Islami*, ( Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2015 ), h.161

atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap mereka.<sup>10</sup>

Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat ide, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa.<sup>11</sup>

Menurut UU RI No. 20 tentang Sisdiknas pada pasal 1 ayat 19 berbunyi : kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.<sup>12</sup>

Menurut Nana Syaodih, kurikulum mempunyai makna luas, mencakup semua pengalaman yang dilakukan siswa dirancang dan diarahkan diberikan bimbingan dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah.<sup>13</sup> Dalam pengembangan kurikulum harus memegang prinsi-prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektifitas.<sup>14</sup>

Dengan demikian Manajemen Implementasi kurikulum adalah proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya dalam menerapkan seperangkat rencana bahan pembelajaran yang telah dirancang oleh sekolah, pendidik atau

---

<sup>10</sup> Omar Mohammad al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1979 ),h. 478.

<sup>11</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, ( Bandung : Kencana, 2008 ),h. 31

<sup>12</sup> Undang-undang Negara RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

<sup>13</sup> Nana Syaodih, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, ( Bandung : Refina Aditama, 2006 ),h.19

<sup>14</sup> Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum*, ( Bandung : Remaja Osdakarya, 2005 ), h.150

guru sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien.

### 1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan.<sup>15</sup> Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah, prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.<sup>16</sup>

### 2. Prinsip Manajemen Kurikulum

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum :<sup>17</sup>

- a. **Produktivitas**, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar para peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen implementasi kurikulum.
- b. **Demokratisasi**, Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik

---

<sup>15</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan kurikulum*, ( Bandung : PT Remaja Rosyda Karya, 2006 ),h.3

<sup>16</sup> Dadang Suhardan, *Manajemen Pendidikan*, ( Bandung : Alfabeta, 2009 ), h.7.

<sup>17</sup> Nana Syaodih, *ibid*, h.150.

pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

- c. **Kooperatif**, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. **Efektifitas dan Efisiensi**, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang singkat.
- e. **Mengarahkan visi, misi dan tujuan** yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.

### 3. Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari implementasi manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga

---

<sup>18</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2008 ), h.3.

perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

- c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan, disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara ciri nasional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah.

#### **4. Fungsi dan kedudukan Kurikulum**

Kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dan kedudukan dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Adapun fungsi kurikulum sebagai berikut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Said Hamidi Hasan, *Kurikulum dan Tujuan Pendidikan*, [http://pk.sps.upi.edu/artikel\\_hamid.html](http://pk.sps.upi.edu/artikel_hamid.html)

**a. Fungsi Penyesuaian**

Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dilingkungan karena lingkungan bersifat dinamis artinya dapat berubah-ubah.

**b. Fungsi Integrasi**

Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat.

**c. Fungsi Diferensiasi**

Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan disetiap siswa yang harus dihargai dan dilayani.

**d. Fungsi Persiapan**

Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa kejenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat, jika tidak melanjutkan pendidikan.

**e. Fungsi Pemilihan**

Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

**f. Fungsi Diagnostik**

Kurikulum sebagai diagnostic mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya.

Sedangkan kedudukan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. **Kurikulum sebagai “ construct “** yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan.
- b. **Kurikulum berposisi sebagai jawaban** untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan pendidikan.
- c. **Kurikulum untuk membangun kehidupan** masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan ssebagai dasar untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

## **B. Pendidikan Agama Islam**

Dalam bahasa Indonesia , istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok.<sup>20</sup>

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “education “ yang berarti bimbingan. Selanjutnya dalam bahasa Arab istilah pendidikan sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi

---

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*/Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,ed2,( Jakarta : Balai Pustaka,1997 ),h.252.

<sup>21</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2008 ),h. 13



seseorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.<sup>22</sup>

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ahmad D Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.<sup>25</sup>

Pendidikan dalam arti luas adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran serta latihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal ( sekolah ) non-formal ( masyarakat ) dan in-formal ( keluarga ) dan dilaksanakan sepanjang hayat, dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan. Pendidikan dalam pengertian sempit sudah mempunyai sistem tersebut terutama di lembaga

---

<sup>22</sup> Sudirman,, *Ilmu Pendidikan* ( Bandung : CV. Remaja Karya, 1997 ),h.4

<sup>23</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ),h.

<sup>24</sup> Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* , ( Bandung : PT.AI Maarif, 1991

<sup>25</sup> Undang-undang Negara RI. No 20 tahun 2003, *Tentang Sissstem Pendidikan Nasional*.

pendidikan non-formal dan in-formal tidak begitu terikat secara ketat dengan peraturan yang berlaku.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terencana yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mendapatkan perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu untuk serta membentuk kepribadian yang bermartabat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pendidikan Agama Islam. Adapun kata Islam dalam istilah Pendidikan Islam menunjukkan sikap pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang memiliki warna-warna. Menurut Harun Nasution Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan amal.<sup>28</sup>

Menurut Al Rasyidin pendidikan Islam adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan manusia sebagai peserta didik untuk mengembangkan diri, fisik jasmani dan non fisik rohani dan potensi yang dimilikinya agar berkemampuan merealisasikan syahadah primordialnya terhadap keberadaan dan kemahaesaan Allah SWT, melalui pemenuhan fungsi dan tugas penciptaanya, yakni sebagai hamba Allah dan khalifah Allah.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ibid,h.18

<sup>27</sup> Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspek*, ( Jakarta : Universitas Indonesia Press), 1978 ),h. 24

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam : Pola Hidup Manusia Beriman*, ( Bandung : CV.Diponegoro, 1999 ),h. 15

<sup>29</sup> Al Rasyidin, *Filsafat Pendidikan Islami*,ibid,h. 119.

Menurut Mohammad Fadhil al-Jamaly Pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaanya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajaranya ( pengaruh dari luar )<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pelaksanaan pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat kelak.<sup>31</sup>

Dari beberapa pendapat tentang definisi tentang pendidikan agama islam, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama islam adalah suatu proses bimbingan dan pembelajaran dari segi aspek jasmani dan rohani yang berlandaskan ajaran islam dan proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi kepribadian sehingga terbentuklah kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam. Pada hakekatnya setiap kehidupan mengandung unsur pendidikan ada atau tidak ada yang mengajar karena manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial masyarakat, namun yang terpenting adalah bagaimana peserta didik menyesuaikan diri atau menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan siapapun.

## 1. Dasar Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam diri penganutnya. Sejalan dengan itu maka rujukan yang dijadikan landasan pemikiran pendidikan Islam itu identik

---

<sup>30</sup> Muhammad. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1994 ), h.17

<sup>31</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992 ),h.86

dengan sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yakni : Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya dasar tersebut dikembangkan melalui pemahaman para ulama dalam bentuk qiyas syar.i, ijma', ijtihad, dan tafsir yang benar yang terkemas dalam pemikiran yang menyeluruh dan terpadu.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Ramayulis dasar dari pendidikan Islam dapat dibagi kepada tiga katagori yaitu ( 1 ) Dasar pokok, (2) Dasar tambahan, dan (3) Dasar operasional.<sup>33</sup>

#### a. Dasar Pokok

Dasar pokok dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis, menempatkan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pemikiran dalam pembentukan sistem pendidikan Islam mengacu kepada kebenaran hakiki yang telah direkomendasikan oleh Sang Maha Pencipta itu sendiri, seperti yang termaktub dalam surat al-baqoroh (QS 2:2 ) berbunyi :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ . (البقرة: 2)

Artinya : Kitab ( Al-Quran ) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang taqwa.

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa kedudukan Al-Qur'an yang begitu tinggi karena dia bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi tidak perlu diragukan kebenaran yang dikandungnya oleh siapapun, bukti-bukti rasional dan emosional menyangkut kebenaran sumber dan kandungannya sangat jelas, Al-Qur'an sebagai petunjuk yang sempurna bahkan perwujudan dari petunjuk itu<sup>34</sup>

Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لِحٰفِظُوْنَ . (الحجر : 9)

<sup>32</sup> Jalaluddin, *Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016 ),h. 140-141

<sup>33</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*,h.122

<sup>34</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 1 ( Jakarta : Lentera Hati, 2002 ),h.107.

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami tetap memeliharanya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebenaran Al-Quran bersifat hakiki dan terabadikan, sekaligus tugas kaum muslimin untuk menjaganya serta memelihara otensitas Al-Qur'an dengan banyak cara, seperti menghafal, menulis dan membukukanya, karena itu bila ada yang salah dalam menafsirkan maknanya, berkewajiban untuk meluruskan kesalahan dan kekeliruan itu.<sup>35</sup>

Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama yang dijadikan rujukan sejalan dengan pernyataan Rasul Allah saw, dikemukakan dalam sabda Beliau

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا

تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ. رواه البخاري<sup>25</sup>

Artinya : Telah aku tinggalkan kepadamu, jika kalian berpegang kepadanya tidak akan sesat sesudahku selama-lamanya, yaitu Kitab Allah ( Al-Quran ) dan Sunnah Rasul.<sup>36</sup>

Al-Quran dan Hadis sebagai yang diwariskan oleh Rasul Allah saw, berisi nilai-nilai ajaran Islam secara utuh, lengkap, dan sempurna, termasuk kedalamnya nilai-nilai ajaran Islam sebagai sistem nilai, sistem peradaban , maupun sistem pendidikan.<sup>37</sup>

#### **b. Dasar Tambahan**

Dasar tambahan meliputi perkataan, perbuatan dan sikap para sahabat, Ijtihad, Mashlahah Mursalah ( Kemaslahan ummat), dan Urf ( Nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat )

<sup>35</sup> Ibid. h.420.

<sup>36</sup> مالك ابن أنس، موطأ مالك، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 2009، المجلد 1، ص 49

<sup>37</sup> Jalaluddin, *Pendidikan Islam*, h.141.

**c. Dasar Operasional**

Dasar operasional adalah dasar yang terbentuk sebagai aktualisasi dan sebagai dasar ideal, menurut Hasan Langgulung, dasar operasional ada enam macam, yaitu :

- a) Dasar Historis yaitu dasar yang memberikan andil kepada pendidikan dari hasil pengalaman masa lalu berupa peraturan dan budaya masyarakat.
- b) Dasar Sosial yaitu dasar yang memberikan kerangka budaya dimana pendidikan itu berkembang, dimana pendidikan bergerak dari kerangka kebudayaan yang ada baik memindahkan, memilih, dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri.
- c) Dasar Ekonomi yaitu dasar yang memberi perspektif terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan yang mengatur sumber sumbernya yang bertanggungjawab terhadap anggaran pembelajarannya.
- d) Dasar Politik yaitu dasar yang memberikan bingkai dan ideologi yang digunakan sebagai tempat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat
- e) Dasar Psikologis yaitu dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar, guru, cara-cara terbaik dalam praktek, pencapaian dan penilaian dan pengukuran serta bimbingan.
- f) Dasar Fisologis yaitu dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, memberikan arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya.

Adapun fungsi dari ditetapkannya dasar pendidikan Islam ini adalah agar pendidikan Islam dapat berdiri, terlaksana dengan baik,

tidak menyimpang, dan serta memiliki dasar keteguhan suatu sumber-sumber keyakinan serta tidak mudah terpengaruh dari luar.<sup>38</sup>

## 2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan Agama Islam pada hakekatnya identik dengan tujuan Islam itu sendiri yaitu mengacu kepada informasi yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis.

Menurut M.Arifin, bahwa tujuan pendidikan Islam mengandung tiga dimensi.<sup>39</sup> yakni :

- a. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia.
- b. Dimensi yang mengandung nilai untuk mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.
- c. Dimensi yang mengandung nilai-nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.

Tujuan Pendidikan Islam menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly berdasarkan penjelasan Al-Quran ada empat.<sup>40</sup> yaitu :

- a. Memperkenalkan kepada manusia sebagai individu kedudukannya diantara makhluk dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini.
- b. Memperkenalkan kepada manusia hubungan-hubungan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawabnya terhadap ketentraman masyarakat.

---

<sup>38</sup> Hasan Langgulung, *Azas-azas Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Pustaka Husna,1998 ),h.12

<sup>39</sup> M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Bumi Aksara , 1994 ),h.120

<sup>40</sup> Muhammad Fadhil al-Jamaly, *Filsafat Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan dalam Al-Quran*, terj. Zainal Abidin Ahmad, ( Jakarta : Pepara, 1981 ),h.3

- c. Memperkenalkan kepada manusia alam seluruhnya dan menjadikanya mengetahui hikmah Khalik dalam penciptaanya dan memungkinkan manusia memanfaatkanya.
- d. Memperkenalkan kepada manusia Pencipta alam dan cara beribadahnya kepada-Nya.

Menurut Mahmud Yunus, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi maupun orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia sehingga ia menjadi salah seorang masyarakat yang sanggup hidup di atas kekinya sendiri, mengabdikan kepada Allah SWT dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama ummat manusia.<sup>41</sup>

Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dengan mendidik akhlak dan jiwa mereka, berarti menanamkan rasa fadhilah atau keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.<sup>42</sup>

Tujuan Pendidikan Islam menurut Imam al-Ghazali, menyiapkan anak-anak supaya di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat, Berdasarkan tujuan menurut Imam al-Ghazali tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pendidikan Islam adalah :

---

<sup>41</sup> Mahmud Yunus, *Metode Khusus Pendidikan Agama Islam*, ( Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1983 ),h.113.

<sup>42</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Agama Islam* ,terj. Bustami Abdul Ghani dan Johar Bahri ( Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1987 ),h 24.



1. Tercapainya kesempurnaan insan yang bermuara pada pendekatan Allah SWT.
2. Tercapainya kesempurnaan Insan yang bermuara pada kebahagiaan dunia akhirat.
3. Pendekatan diri kepada Allah SWT yang wujudnya adalah kemampuan dan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.
4. Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia.
5. Mewujudkan profesionalitas untuk mengemban tugas keduniaan dengan sebaik-baiknya.
6. Membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela.
7. Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang manusiawi.<sup>43</sup>

### 3. Fungsi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendidikan digunakan oleh suatu bangsa sebagai sarana untuk kemajuan dan mempertahankan eksistensinya.<sup>44</sup> Sehingga tujuan pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana di Indonesia dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara<sup>45</sup> Pendidikan Agama Islam diberikkan dengan pertimbangan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna,

---

<sup>43</sup>Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran al-Gazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h.56

33.(Natsir dalam Kapita Selektanya, “*tak ada suatu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka*”. Lihat M.Natsir, *Kapital Selekt*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.77).

<sup>45</sup> (Lihat. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional SISDIKNAS No.20 tahun 2003*, (Bandung; Fokusmedia, 2006), h.2).

damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Firman Allah dalam surat Ali Imron Ayat 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي  
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat baik yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegeralah mengerjakan berbagai kebaikan dan mereka termasuk orang-orang soleh.<sup>46</sup>

Firman Allah dalam surat Al-zaariyaat ayat 51

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain selain Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.<sup>47</sup>

Indonesia bukan negara Islam yaitu suatu negara yang mendasarkan pada suatu ajaran agama tertentu. Negara secara keseluruhan dibentuk berdasarkan suatu ajaran agama tertentu, baik mencakup bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, dan demokrasi.<sup>48</sup> dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara Pancasila. Sebagai negara Pancasila, Indonesia mengambil jalan tengah antara negara agama dan negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) memberikan sifat yang khas pada negara Indonesia, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, dan bukan negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap

<sup>46</sup> Depag.RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, ( Semarang : CV.Toha Putra.1989),h.2

<sup>47</sup> Ibid. h.213.

<sup>48</sup> Kaelan. *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta:Paradigma,2006), h.21

warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.<sup>49</sup> (Artinya bahwa Indonesia secara sosial-politik tidak mendasarkan pada agama tertentu. Di sisi lain, Indonesia bukan pula komunitas yang ditata secara sekuler yang tidak memperhatikan kepentingan keagamaan warganya. Sebagai negara yang tidak sekuler, Indonesia memberi kesempatan dan bahkan membantu warganya dalam menjalankan ajaran agamanya. Indonesia memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai. Sebagai implikasinya, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pendidikan agama, baik dalam bentuk pendidikan agama di sekolah-sekolah umum maupun pengembangan lembaga pendidikan keagamaan yang hal ini diperkuat dengan undang-undang Komitmen bahwa agama merupakan elemen penting dalam pendidikan diwakili oleh berbagai kata kunci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya kata ketuhanan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kata ketuhanan dalam silah pertama pancasila, yakni: *Ketuhanan Yang maha Esa*. Ini diartikan bahwa bangsa Indonesia mewajibkan bangsanya harus beragama. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat (1): *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan ayat (2), yakni bahwa *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu*<sup>50</sup>

Pendidikan agama di Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan, namun karena politik pendidikan pemerintah penjajah (Belanda) mencampurti masalah pendidikan agama, sebab agama dianggap menjadi tanggung jawab keluarga.<sup>51</sup> Usul para wakil rakyat pribumi agar pelajaran agama dimasukkan sebagai mata pelajaran di sekolah selalu ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan

---

<sup>49</sup>. Bachtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h.19.

<sup>50</sup>. UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat (1), dan ayat ( 2 )

<sup>51</sup> DEPAG RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Keagamaan Islam, 2005), h.36-39.

agama hanya ada pada sekolah-sekolah swasta yang berdasar keagamaan<sup>52</sup> Baru setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1960 pendidikan agama menjadi pelajaran di setiap sekolah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi<sup>53</sup>

Kedudukan pendidikan agama menjadi semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan selain wajib memuat pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan juga memuat Pendidikan Agama (Pasal 9 ayat 3). Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pendidikan agama harus diberikan sebagai mata pelajaran di setiap sekolah pada setiap jenis, jalur, dan jenjang dimanapun sekolah itu berada sesuai dengan yang dianut peserta didik. Bahkan menurut undang-undang tersebut kursus-kursus juga harus mendapatkan pendidikan agama.

Demikian pengembangan pendidikan Agama Islam sampai akhirnya pembelajaran agama di sekolah umum semakin kokoh oleh berbagai terbitan perundang-undangan hingga lahirnya Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan zaman (Pasal 1 Ayat 1). Kemudian kembali mengukuhkannya dalam Pasal 3 UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang mengatakan bahwa *pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga*

---

<sup>52</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.90.

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Hidakarya Agung,1993 ),h.360-362.

*negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* Pendidikan agama dalam UU SISDIKNAS bahkan memperoleh tempat yang cukup istimewa karena merupakan salah satu bahan ajar yang wajib dibelajarkan secara kumulatif di seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai Perguruan Tinggi yaitu dijelaskan pada pasal 37.<sup>54</sup> Dalam hal ini berarti bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah agar mampu melahirkan *output* yang beriman dan bertaqwa (sesuai dengan ajaran agama yang diyakini), berakhlak mulia, serta memiliki kualitas intelektual yang tinggi.

Sebagaimana dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan yang menjelaskan bahwa fungsi pendidikan agama ialah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan keamanan hubungan inter dan berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyelaraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 2 ayat 2). Hal tersebut dikuatkan dalam pasal berikutnya yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Agama.<sup>55</sup>

Pendidikan Indonesia menginginkan pengembangan dan pembinaan manusia yang seutuhnya dalam artian ada keseimbangan antara pembinaan yang bersifat lahiriyah dan pembinaan batiniah.<sup>56</sup>

Untuk mencapai maksud tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang integral dan berkesinambungan. Dalam proses pendidikan seperti itu, pendidikan agama merupakan komponen yang sangat penting karena pembahasan tentang iman dan taqwa secara proporsional berada dalam ruang lingkup pendidikan

---

<sup>54</sup> *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, (Bandung: Fokusmedia, 2006),h.5.

<sup>55</sup> PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan

<sup>56</sup> UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 SISDIKNAS, (Bandung: Fokusmedia,2006), h.2-6

agama.<sup>57</sup> Maka pendidikan agama dituntut untuk memberikan kontribusi seoptimal mungkin untuk merealisasikan cita-cita pendidikan tersebut.

Di Indonesia agama sangat dominan menjiwai rakyatnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka tidaklah heran apabila agama dalam berbagai aspek dan manifestasinya mendapat perhatian besar di negeri ini. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian besar adalah pelaksanaan pendidikan agama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga formal, lembaga-lembaga keagamaan maupun di lembaga-lembaga pendidikan umum.<sup>58</sup>

Pendidikan agama diberikan di setiap sekolah umum maupun swasta dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi bahkan diatur oleh Negara.<sup>59</sup>

Pendidikan Indonesia menginginkan pengembangan dan pembinaan manusia yang seutuhnya dalam artian ada keseimbangan antara pembinaan yang bersifat lahiriyah dan pembinaan batiniah.<sup>60</sup> Untuk mencapai maksud tersebut dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang integral dan berkesinambungan.

Dalam proses pendidikan seperti itu, pendidikan agama merupakan komponen yang sangat penting karena pembahasan tentang iman dan taqwa secara proporsional berada dalam ruang lingkup pendidikan agama.<sup>61</sup> Maka pendidikan agama dituntut untuk memberikan kontribusi seoptimal mungkin untuk merealisasikan cita-cita pendidikan tersebut.

Berkaitan dengan maraknya era globalisasi yang mempunyai dampak negatif disamping dampak positif, maka masyarakat mulai merasakan perlu terhadap

---

<sup>57</sup> UU SISDIKNAS, 2003, pasal 12 ayat 1

<sup>58</sup> Harun Nasution, dkk, *Pendidikan Agama dalam Perspektif Agama-agama*, (Jakarta: DEPDIKBUD, 1995),h.27

<sup>59</sup> TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Pasal 1

<sup>60</sup> Ali Ashraf, *Horisan Baru Pendidikan Islam*, (“jakarta:Pustaka Firdaus,1993), cet 2, h.2.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan aksi*, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa,2000),h.22..

pendidikan agama. Sehingga pendidikan agama merupakan salah satu yang dijadikan nilai keunggulan bagi sekolah-sekolah yang bermunculan. Di kalangan sekolah swasta, pembinaan keagamaan menjadi nilai plus bagi suatu sekolah dan menjadi sekolah pilihan bagi orangtua.<sup>62</sup>

Jika berbicara lebih luas lagi berkaitan dengan agama, agama seperti diyakini oleh para studi fenomenal agama merupakan kebutuhan yang amat mendasar. Sebab dalam diri manusia terdapat keinsyafan beragama (*sense of religious*) yang menurut Max Scheler sebagai kemampuan yang otonom atau *gharizah fitriyyah* dalam pandangan Islam. Bagaimanapun pesatnya perkembangan masyarakat, agama tetap sebagai kebutuhan yang paling fundamental.

Perubahan masyarakat secara berkala akan mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pendidikan.<sup>63</sup> Pendidikan yang akan dipilihnya sudah barang tentu yang dapat mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya pendidikan yang kurang memberikan janji masa depan tidak akan mengandung minat atau antusiasme masyarakat. Sesuai dengan ciri masyarakat tersebut maka pendidikan yang akan dipilih oleh masyarakat adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan secara teknologis, fungsionalis, individual, informatif, dan terbuka. Dan yang lebih penting lagi, kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa maraknya kehidupan agama yang ditandai dengan besarnya minat dan perhatian masyarakat terhadap pendidikan agama. Semua kecendrungan perkembangan tersebut perlu dijadikan titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan agama agar tetap menemukan signifikansi dan relevansinya dengan perubahan masyarakat. Terutama pada era sekarang ini, dimana banyak kasus yang menimpa generasi penerus kita termasuk

---

<sup>62</sup>Dedi Supriadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. ke-2, h. 127.

<sup>63</sup>Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), h. 78

dalam hal ini para pelajar mulai dari kasus tawuran, narkoba, pergaulan bebas dan perbuatan menyimpang lainnya, maka peran pendidikan agama menjadi sangat signifikan terutama dalam membentuk karakter dan perilaku siswa.

### C. Mutu Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb) kualitas.<sup>64</sup>

Banyak ahli yang mengemukakan tentang mutu, mutu adalah sebuah filosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Sudarwan Darwin, mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang dan jasa,<sup>65</sup>

Manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang.<sup>66</sup>

Definisi mutu memiliki konotasi yang bermacam macam bergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa latin yakni “Qualis” yang berarti *what kind of* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran adalah kecocokan dengan kebutuhan.<sup>67</sup> Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kesesuaian antara perencanaan

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1991 ),h.677.

<sup>65</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2007 ),h.53.

<sup>66</sup> (Edward Sallis, *Total Quality Manajemen*, terj, Ahmad Ali Riyadi, (Yogyakarta: Ireisod, 2006), h.73.

<sup>67</sup> **Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.407.**



yang dibuat guru dengan penerapan atau silabus yang dibuat guru dengan siswa maka proses pembelajaran tersebut dianggap bermutu. Begitu kecocokan dengan kebutuhan, ini dapat disimpulkan bahwa kecocokan waktu ngajar yang dipilih, strategi yang digunakan dan metode yang digunakan guru cocok dengan tingkat siswa yang menerimanya.

Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut. Maka dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

### **1. Tolak Ukur Mutu Pembelajaran**

Untuk mengukur mutu tersebut maka indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu yaitu:

- a. Hasil akhir pendidikan
- b. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai tolak ukur mutu dalam suatu lembaga pendidikan.
- c. Proses pendidikan.
- d. Instrumen input yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)
- e. Raw input dan lingkaran<sup>68</sup>

Usman Husaini mengemukakan mutu adalah konsep yang absolut dan realtif. Mutu yang absolut adalah mutu yang idealismenya tinggi dan

---

<sup>68</sup> Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk abad 21, Indikator Cara pengukuran dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan* (Jakarta: Sindo, 199), h. 390.

harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.<sup>69</sup> Mutu dibidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui lulusannya dan merasa puas.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Hari Sudradjat pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia. Yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), lebih lanjut Sudradjat mengemukakan pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.<sup>71</sup> Lalu Sumayang menyatakan *quality* (mutu) adalah tingkat dimana rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya, disamping itu *quality* adalah tingkat dimana sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan rancangan spesifikasinya.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006 ), h.408.

<sup>70</sup> Usman Husaini, h. 410.

<sup>71</sup> Sudradjat Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Pendidikan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), h.17

<sup>72</sup> Lalu Sumayang, *Manajemen Produksi dan Operasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003). h.14.

Bagi setiap instansi pendidikan, mutu adalah agenda utama dan merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki, mutu merupakan hal yang membingungkan dan sulit diukur. Ini berarti ada perbedaan dalam mendefinisikan mutu.

Bisa saja mencapai hasil dan mengetahui mutu ketika kita mengalaminya dan tetap akan terasa sulit ketika hendak mendeskripsikan dan menjelaskan perihal mutu. Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan//atau yang sebaliknya. Dengan demikian mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.

Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. Karena itu ada banyak faktor yang dapat menjadi indikator mutu, misalnya: gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orangtua, bisnis, dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar, dan anak didik, kurikulum yang memadai atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Mewujudkan Mutu Pembelajaran**

Unsur-unsur yang terlibat dalam mewujudkan mutu pembelajaran dapat dilihat dari sudut pandang makro dan mikro.<sup>73</sup>

### **a. Pendekatan Mikro Pendidikan**

Yaitu suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan

---

<sup>73</sup> Eti Rochaety, dkk, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.8.

interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Secara lengkap elemen mikro sebagai berikut:

1. Kualitas manajemen
2. Pemberdayaan satuan pendidikan
3. Profesionalisme dan ketenagaan
4. Relevansi dan kebutuhan

Berdasarkan tinjauan mikro, elemen guru dan siswa yang merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta didik mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai sumber dan kendala, dengan memperhatikan sumber dan kendala ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Proses ini menampilkan hasil belajar. Hasil belajar perlu dinilai dan hasil penilaian dapat merupakan umpan balik sebagai bahan masukan dan pijakan.

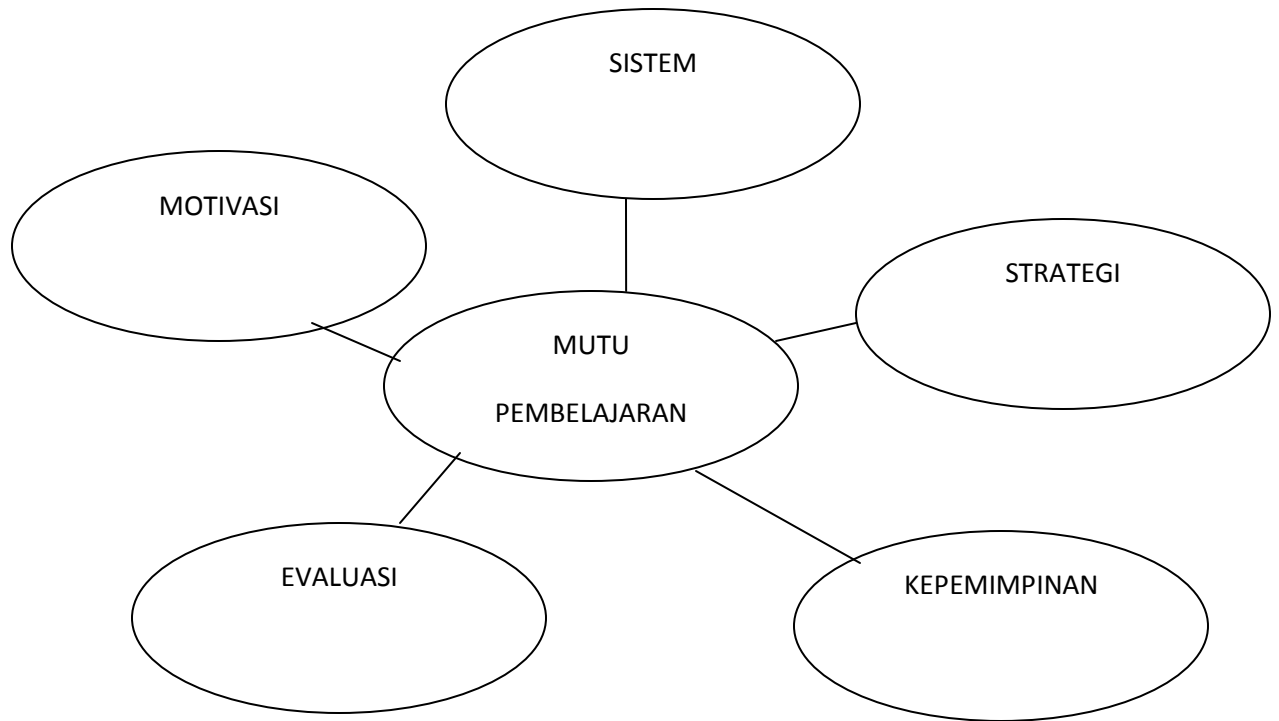
#### **b. Pendekatan Makro Pendidikan**

Yaitu kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas dengan elemen sebagai berikut:

1. Standarisasi pengembangan kurikulum
2. Pemerataan dan persamaan, serta keadilan
3. Standar mutu
4. Kemampuan bersaing

Tujuan makro pendidikan menyangkut berbagai hal, bahwa pendekatan makro pendidikan melalui jalur pertama yaitu; input sumber, proses pendidikan, dan hasil pendidikan.

Sebagaimana yang lebih dijelaskan, bahwa lingkaran mutu dalam perbaikan pembelajaran sebagai satu komponen lingkaran mutu, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: Lingkaran Mutu Pembelajaran.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa mutu pembelajaran dilingkari oleh berbagai komponen, 1) Sistem. Sistem mutu harus didesain dengan baik oleh guru, guru dalam mengajar harus mengetahui apa yang akan dilakukannya, mempelajarinya, memperbaiki, dan menyempurnakan metode dan prosodu, mencatat apa yang telah diajarkanya. (2) Startegi. Guru dituntut untuk menguasai stategi dalam pembelajaran dan juga stategi-strategi yang cocok untuk ditetapkan terhadap siswa dalam berbagai kondisi. (3) Kepemimpinan. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran sangat dibutuhkan guru yang berjiwa kepemimpinan, dalam memimpin proses pembelajaranya. (4) Evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh guru sangat mendukung terhadap perbaikan mutu pembelajaran selanjutnya, karena dengan evaluasi, guru bisa mengetahui celah-celah kelemahanya dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung. (5) Motivasi. Motivasi yang tinggi akan menjadikan guru yang kreatif dan inovatif.

### 3. Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran

Terkait dengan tugas dan posisinya yang sangat strategis, maka kepala sekolah dituntut memiliki kreatifitas, yakni kemampuan untuk mentransformasikan ide dan imajinasi serta keinginan-keinginan besar menjadi kenyataan. Untuk menjadi orang kreatif, kepala sekolah harus memiliki imajinasi, harus memiliki kekuatan ide melahirkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, kemudian untuk menjadi orang kreatif, dia juga harus berusaha mencari cara bagaimana ide-ide tersebut diturunkan menjadi sebuah kenyataan. Dengan demikian, untuk menjadi kreatif setiap kepala sekolah harus memiliki dua variable utama, ide dan karya.

Menurut Paul V. Bredesen, seorang guru harus melakukan delapan langkah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Selalu melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa, khususnya analisis terhadap hasil ujian siswa, dengan mengkaji perbedaan antara hasil belajar dengan tujuan standar kompetensi siswa
- b. Melibatkan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, dan meningkatkan pengalaman belajar mereka untuk mencapai apa yang mereka butuhkan
- c. Melakukan analisis apakah program-program yang sudah diorganisir masih efisien untuk mengatasi masalah.
- d. Melakukan analisis apakah program kegiatan sekolah sesuai dengan kegiatan harian.
- e. Melakukan analisis apakah kegiatan yang sedang berjalan dan program belajar berikutnya mendukung terhadap kebutuhan studi lanjut.

---

<sup>74</sup> Paul V. Bredesen, *The school Principal's Role In Teacher Professional Development*, Journal of in Service Education, USA, 2013.

- f. Melakukan evaluasi bersama dengan menggunakan data dari berbagai sumber belajar siswa dan bahan ajar yang diajarkan guru.
- g. Memberi kesempatan bagi guru untuk akses pada teori-teori mendasari pengetahuan, dan ketrampilan yang mereka pelajari.
- h. Melakukan analisis apakah program siswa sesuai dengan tujuan melakukan perubahan yang komprehensif pada siswa, dan apakah program perubahan tersebut fokus pada kemajuan belajar siswa.

Selanjutnya Jeanette Colby berpendapat dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah, kepala sekolah sebagai manager yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya satuan pendidikan yang menjadi wilayah otoritasnya, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Merumuskan visi kepemimpinannya
- b. Mempersiapkan sekolah yang layak untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran
- c. Bersikap sebagai seorang leader dihadapan seluruh staf akademik dan non akademik
- d. Mengoptimalkan layanan seluruh stafnya untuk mempercepat kemajuan
- e. Menganalisis terhadap kesesuaian hasil belajar siswa dengan visi dan tujuan sekolah, kebutuhan siswa, kebutuhan studi lanjut, serta mengarahkan guru untuk menyesuaikan program pembelajaran dan proses pembelajaran dengan pencapaian visi tersebut

Selain itu, kepala sekolah harus mempunyai kecakapan operasional yang bagus untuk mengendalikan organisasi. Kecakapan organisasi

---

<sup>75</sup> Jeanette Colby, *Defining Quality in Education*, Working paper of education section, program division, ( UNICEF, New York 2000 ), h.11.

menurut Sudarwan Danim dan Suparno terdiri atas beberapa hal, diantaranya adalah :<sup>76</sup>

- a. Menjadi komunikator dan guru yang baik
- b. Mempunyai kecakapan teknis.
- c. Terampil berhubungan secara manusiawi.
- d. Mampu dan terampil secara konseptual.
- e. Mengendalikan rapat dengan baik.
- f. Menjadi motivator.
- g. Sering tampil ditengah komunitas.
- h. Memiliki humor.
- i. Membina integritas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan pendidikan adalah yang mampu memperdayakan seluruh potensi kelembagaan dalam menentukan kebijakan.

Selanjutnya Supriadi mengatakan bahwa untuk menjadi guru yang profesional dituntut untuk memiliki lima hal yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar.
- b. Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada siswa.
- c. Guru memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi.
- d. Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
- e. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

---

<sup>76</sup> Sudarwan Danim & Suparno, *Manajemen dan kepemimpinan Transformasi kekepalasekolahan*, ( Jakarta : Rineke Cipta, 2009 ),h.96.

<sup>77</sup> Supriadi,D, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, (Jakarta : Depdikbud, 1998 ),h.56.



Sedangkan peran guru yang harus dijalankan sesuai dengan jabatan keguruannya, seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya yaitu: <sup>78</sup>65

**a. Guru sebagai sumber belajar.**

Guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting, maka guru harus melakukan hal-hal berikut :

- a. Guru sebaiknya memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa.
- b. Guru dapat menunjukan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata siswa yang lain.
- c. Guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pelajaran

**b. Guru sebagai fasilitator**

Guru sebagai fasilitator harus berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator maka guru harus memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber pembelajaran yaitu :

- a. Guru memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media tersebut.
- b. Guru perlu mempunyai ketrampilan dalam merancang suatu media.
- c. Guru dituntut mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar.
- d. Guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa.

**c. Guru sebagai Pengelola pembelajaran**

---

<sup>78</sup> Sanjaya,W, *Strategi pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2008 ),h.27-29

Guru sebagai pengelola pembelajaran, berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru adalah :

- a. Segala sesuatu yang dipelajari oleh siswa, maka siswa harus mempelajarinya sendiri.
- b. Setiap siswa yang belajar memiliki kecepatan masing-masing.
- c. Setiap siswa akan belajar lebih banyak apabila setiap selesai melaksanakan tahapan kegiatan diberikan reinforcement.
- d. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti.
- e. Apabila siswa diberi tanggungjawab, maka siswa akan lebih termotivasi..

**d. Guru sebagai Demonstrator**

Guru sebagai Demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator yaitu :

- a. Guru harus menunjukkan sikap-sikap yang terpuji
- b. Guru harus menunjukkan bagaimana agar setiap materi pelajaran bisa difahami.

**e. Guru Sebagai Pembimbing.**

Sebagai pembimbing guru harus :

- a. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya

- b. Guru harus terampil dan memahami dalam merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan prose pembelajaran.

**f. Guru Sebagai Motivator**

Sebagai motivator guru dituntut mempunyai kreatifitas dalam membangkitkan motifasi belajar yaitu :

- a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
- b. Membangkitkan niat siswa.
- c. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar.
- d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil
- e. Member penilaian kepada siswa.
- f. Memberi komentar setiap pekerjaan siswa.

**g. Guru sebagai Evaluator**

Sebagai evaluator guru harus berfungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi pelajaran.

**4. Keterampilan Dasar Mengajar Guru dan Merencanakan Program Belajar**

Keterampilan dasar mengajar guru sangat diperlukan supaya guru dapat melaksanakan prose pembelajaran yang sesuai dengan harapan, serta efektif dan efesien dan yang sangat penting adalah ketrampilan dasar mengajar syarat mutlak bagi guru agar dapat mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, ada beberapa ketrampilan dasar mengajar yaitu :

**a. Keterampilan Dasar Bertanya**

Pertanyaan yang baik akan memberikan dampak positif bagi siswa yaitu : meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran dan dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa

**b. Keterampilan variasi stimulus**

Ketrampilan variasi stimulus adalah ketrampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan

**c. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran**

Tujuan ketrampilan ini adalah menarik perhatian siswa agar yakin bahwa materi yang akan disampaikan adalah berguna baginya serta menumbuhkan motivasi belajar siswa.

**d. Keterampilan mengelola kelas**

Ketrampilan mengelola kelas adalah ketrampilan mengelola kelas untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal.

Adapun perencanaan proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan yang diharapkan. Dalam kegiatan ini yang dituntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajarnya sesuai dengan rencana yang disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah diubah metodenya, apakah kegiatannya perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran

Sri Yutmini mengemukakan bahwa persyaratan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi : Penggunaan metodologi mengajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan

pelajaran, berkomunikasi dengan siswa, mendemonstrasikan berbagai metode mengajar dan melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.<sup>79</sup>

Hal serupa juga dikemukakan oleh Harahap, bahwa kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan : Memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, mengarahkan tujuan pengajaran, melakukan pemantapan, menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, memperbaiki program belajar mengajar, dan melaksanakan penilaian belajar.<sup>80</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif siswa.

## 5. Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar

Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebabkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan.<sup>81</sup>

Selanjutnya menurut Ngalim Purwanto bahwa prinsip-prinsip evaluasi pendidikan meliputi :<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Sri Yutmini, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surakarta : FKIP UNS, 1992), h.13.

<sup>80</sup> Baharuddin Harahap, *Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru kepada Sekolah Pemilik dan Pengawas Sekolah*, (Jakarta : Damai Jaya, 1983), h.32.

<sup>81</sup> Oteng Sutisno, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, (Bandung : Angkasa, 1985), h.212.

<sup>82</sup> Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widya, 1989), h.146.

- a. Prinsip Integritas yaitu bahwa yang dinilai bukan hanya kecerdasan atau hasil pelajaran atau ingatannya saja, melainkan seluruh pribadinya.
- b. Prinsip Kontinuitas yaitu evaluasi yang baik tidak mungkin hanya dilakukan secara insidental belaka karena pendidikan merupakan suatu proses yang kontinu, maka penilaian juga harus dilakukan secara kontinu.
- c. Prinsip Obyektivitas yaitu Tiap penilaian harus diusahakan agar dilakukan seobyektif mungkin.
- d. Prinsip Kooperatif yaitu yang erat hubungannya dengan ketiga prinsip, maksudnya bahwa setiap penilaian hendaknya dilakukan bersama-sama oleh semua guru yang bersangkutan.

Sedangkan tujuan dan fungsi evaluasi menurut R. Soebagijo menyebutkan:<sup>83</sup>

- a. Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai ketrampilan atau pengetahuan dasar tertentu.
- b. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar.
- c. Untuk mengetahui hasil belajar siswa.
- d. Sebagai feed back

#### **D. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Mengenai topik penelitian yang berkaitan dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam ( PAI ) di SMA Unggulan CT Foundation belum ditemukan. Sedangkan penelitian kurikulum Pendidikan Agama Islam yang pernah dibahas adalah :

---

<sup>83</sup> R. Soebagijo, *Evaluasi Pendidikan*, ( Salatiga : FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, 1978 ),h.13.

1. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Pada Materi Perilaku Terpuji Kelas VII-F di SMP Negeri 28 Medan oleh Armiami Batu Bara.<sup>84</sup> Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran, pendukung, dan penghambat pelaksanaan PAI berbasis teknologi. Kajian ini menghasilkan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru yang menguasai teknologi, kurangnya tersedia peralatan di sekolah, anggaran sekolah yang masih rendah untuk dapat memfasilitasi pemanfaatan TIK, masih banyaknya beban kurikulum yang harus dicapai.
2. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Tuna Daksa di Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB ) Negeri Kota Juang Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh oleh Nuridin.<sup>85</sup> Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI bagi anak tuna daksa di SDLB Negeri Kota Juang. Kajian ini menghasilkan masih berkurangnya buku penunjang pembelajaran PAI bagi Tuna Daksa dan sumber daya guru yang professional serta metode yang digunakan masih monoton.
3. Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah : ( Studi Kritis Kurikulum Pendidikan Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 ) oleh Hajaruddin.<sup>86</sup> Penelitian ini mengkaji tentang kegagalan dalam membentuk pelajar yang berakhlak dan beradab karena gagalnya pelaksanaan PAI di sekolah. Kajian ini

---

<sup>84</sup> Armiami Batu Bara : *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Pada Materi Perilaku Terpuji Kelas VII-F di SMP Negeri 28 Medan* ( Tesis S2 Pascasarjana UIN SU 2014 )

<sup>85</sup> Nuridin : *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Tuna Daksa di Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB ) Negeri Kota Juang Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh* ( Tesis S2 Tesis S2 Pascasarjana UIN SU 2014 )

<sup>86</sup> Hajaruddin : *Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah : ( Studi Kritis Kurikulum Pendidikan Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 )* (Tesis S2 Tesis S2 Pascasarjana UIN SU 2013 )

menghasilkan perlunya dikaji kembali secara kritis khususnya mengenai aspek-aspek tujuan, materi, metode, dan pendekatan serta evaluasinya dari kurikulum PAI.